

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PTUN KENDARI TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (SH) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah

Oleh :

FITRAH INDRIATY
NIM: 19020103010

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
KENDARI**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM PTUN KENDARI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA " yang ditulis oleh FITRAH INDIATY NIM. 19020103010 Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Muh. Asrianto Zainal SH, M.Hum

Sekretaris : Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI.,
M.HI., M.H

Anggota1 : Mahruddin S. Sos, M.Si

Anggota2 : Ahmadi S. HI, M.H

Kendari, 21 Agustus 2024
Bekas

Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH, MH,
NIP. 197308231998031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Draft skripsi ini berjudul “Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa” yang ditulis oleh Fitrah Indriaty, NIM.19020103010, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, setelah dikonsultasikan dan dikoreksi memandang bahwa draft skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian skripsi. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Kendari, 06/11/2023

Dosen Pembimbing I

Muh. Asrianto Zainal SH., M.Hum
NIP.199706262003121006

Dosen Pembimbing II

Aris Nur Qadar Ar Razak, S.HI., M.HI., M.H
NIP.199104112018011001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa” dibawah bimbingan Muh. Asrianto Zainal SH.,M,Hum dan Aris Nur Qadar Ar Razak S.HI., M.HI., M.H telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua sumber rujukan yang digunakan dalam skripsi ini telah disebutkan di dalam daftar Pustaka. Dengan penuh kesadaran saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi yang dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 6 Agustus 2024
Penyusun,



Fitrah Indriaty

NIM. 19020103010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrah Indriaty
NIM : 19020103010
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa
Pemberhentian Perangkat Desa”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 6 Agustus 2024

Penyusun,



Fitrah Indriaty

NIM. 19020103010

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur selalu tercurahkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim PTUN Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa”, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan disetiap proses penelitian yang dilakukan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran dan dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang dapat kita rasakan hingga detik ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan, dukungan dan doa dari beberapa pihak yang sangat berpengaruh bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang telah ditentukan. Peneliti berharap semoga bantuan dan dukungan serta berbagai jerih payah yang telah disumbangkan kepada peneliti mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan tetap mendapat lindungan-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tersayang yaitu Bapak Irfan Bakri dan Ibu Fadilah Kaddas yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa dan bantuan yang sangat luar biasa serta berkat jerih payah merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya tak lupa pula penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
2. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
3. Bapak Finsa Adhi Pratama M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah (IAIN) Kendari.
4. Bapak Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Aris Nur Qadar Ar-Razak, S.HI., M.HI., MH., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, serta tenaganya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan nasehat yang sangat berguna bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Mahrudin, S. Sos, M.Si., selaku penguji I dan Bapak Ahmadi, S.HI., M.H., selaku penguji II yang telah memberikan arahan, masukan dan sarannya selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Zainal Abidin S.H., selaku hakim PTUN Kendari yang telah memberikan masukan dan sarannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen pengajar dan staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) kelas A yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S1.

9. Kepada saudara Ainan Salsabila dan Intan Restalia Ardilla yang tak henti-hentinya selalu memberikan semangat dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih sangat membutuhkan saran dan kritik demi kesempurnaannya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Akhir kata penulis memohon ampunan kepada Allah SWT, atas segala khilaf baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

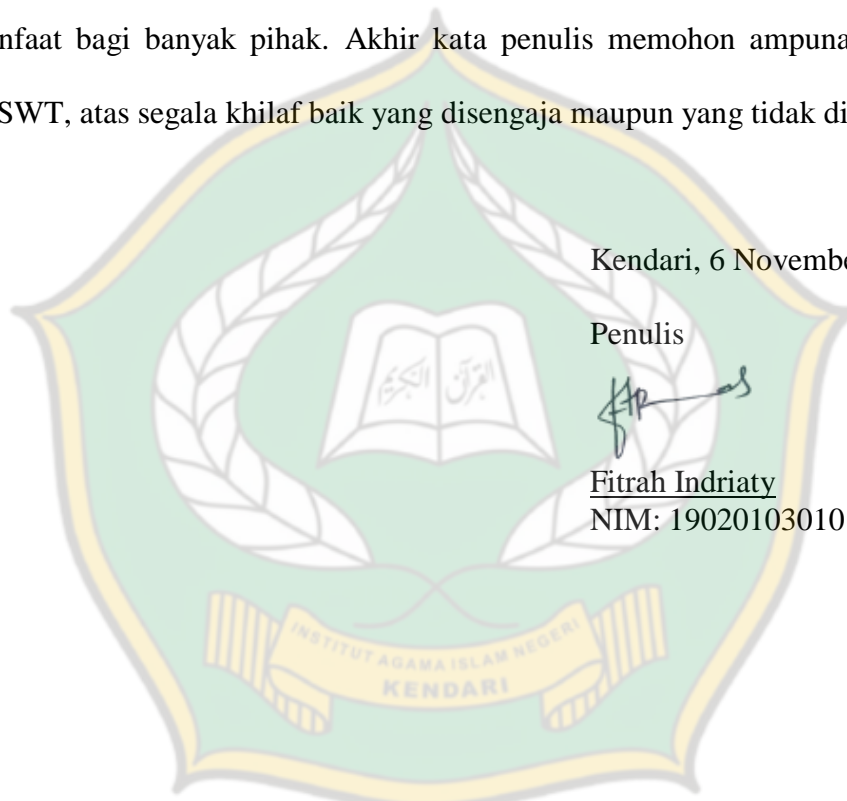
Kendari, 6 November 2023

Penulis



Fitrah Indriaty

NIM: 19020103010



ABSTRAK

FITRAH INDRIATY. NIM. 19020103010. “Analisis Putusan Hakim PTUN Kendari Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa”. Di Bimbing Oleh: Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum., dan Aris Nur Qadar Ar-Razak, S.HI., M.HI., MH.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari oleh perangkat desa selaku orang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas dikeluarkannya surat keputusan kepala desa selaku pejabat tata usaha negara terkait sengketa pemberhentian perangkat desa yang semakin meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022. **Tujuan pertama** penelitian ini, yakni untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar gugatan perangkat desa dalam pengajuan gugatan terkait pemberhentian perangkat desa di PTUN Kendari dan **tujuan kedua**, yakni untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim PTUN Kendari dalam mengeluarkan putusan tentang penyelesaian sengketa pemberhentian perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang menjadi dasar gugatan bagi perangkat desa dalam mengajukan gugatan di PTUN Kendari tentang pemberhentian perangkat desa yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa Adapun batu uji pengujian sengketa tata usaha negara oleh hakim PTUN Kendari sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai keabsahan suatu keputusan yang dikeluarkan pejabat Tata Usaha Negara dinilai dari 3 (tiga) aspek, yakni: 1. wewenang badan/pejabat pemerinntahan dalam menerbitkan keputusan; 2. Prosedur penerbitan; dan 3. Subsatansi keputusan.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB.

ABSTRACT

FITRAH INDRIATY. NIM. 19020103010. "Analysis of the Kendari Administrative Court Judge's Decision on Settlement of Village Apparatus Dismissal Disputes". Guided By: Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum., and Aris Nur Qadar Ar-Razak, S.HI.,M.HI., MH.

This research was motivated by the many lawsuits filed at the Kendari State Administrative Court (PTUN) by village officials as individuals or civil legal entities who were harmed by the issuance of village head decrees as state administrative officials regarding disputes over the dismissal of village officials which has been increasing from year 2020 to 2022. The first objective of this research is to find out what is the basis for a lawsuit by village officials in filing a lawsuit regarding the dismissal of village officials at the Kendari State Administrative Court and the second objective, namely to find out how the judges of the Kendari State Administrative Court consider decisions regarding the settlement of dismissal disputes. village apparatus. The type of research used is normative legal research. This research was conducted using a statutory approach (statute approach).

The results of this study explain that the basis for the lawsuit for village officials in filing a lawsuit at the Kendari Administrative Court regarding the dismissal of village officials is Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2015 concerning Amendments to Law Number 43 of 2014 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 6 of 2014, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 67 of 2017 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Officials and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration and General Principles of Good Governance. This study also explains that the test stone for testing state administrative disputes by Kendari State Administrative Court judges is in accordance with Article 53 paragraph (2) of Law Number 9 of 2004 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court, namely regulations legislation and the General Principles of Good Governance (AUPB). Judges at the State Administrative Court regarding the validity of a decision issued by a State Administrative official are assessed from 3 (three) aspects, namely: 1. authority of the government agency/official in issuing the decision; 2. Issuance procedures; and 3. Substance of the decision.

Keywords: Judge's Decision, Dismissal of Village Officials, Legislation and AUPB

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Fokus penelitian	7
1.3 Rumusan masalah.....	8
1.4 Tujuan penelitian.....	8
1.5 Manfaat penelitian.....	8
1.6 Definisi operasional	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Kajian Relevan.....	12
2.2 Kajian Teori	14
2.2.1 Konsep Negara Hukum	14
2.2.2 Konsep Good Governance.....	20
2.2.3 Konsep Putusan Peradilan	23
2.2.4 Konsep Pemerintah Desa.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Tempat Penelitian.....	38
3.3 Data Dan Sumber Data.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Dasar Gugatan Perangkat Desa Dalam Pengajuan Gugatan Terkait Pemberhentian Perangkat Desa Di PTUN KDI.....	56

4.1.1	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	57
4.1.2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	59
4.1.3	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	63
4.1.4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	64
4.1.5	Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	68
4.2	Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Dalam Mengeluarkan Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa	71
4.2.1	Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Dalam Mengeluarkan Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2020.....	72
4.2.2	Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Dalam Mengeluarkan Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2021.....	85
4.2.3	Pertimbangan Hakim PTUN Kendari Dalam Mengeluarkan Putusan Tentang Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2022.....	100
BAB V PENUTUP		114
5.1	Kesimpulan	114
5.2	Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA		117
LAMPIRAN.....		121